

Strategi Government Public Relations (GPR) Pemda DIY dalam mengelola informasi publik pasca pandemi covid-19

Ilham Hilal Ramadhan
Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
ilhamhilal.2019@student.uny.ac.id

Eko Prasetyo Nugroho Saputro
Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
ekoprasetyo@uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana strategi dan kendala Humas Pemda DIY dalam mengelola informasi publik pasca pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Data penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu wawancara dan diperkuat dengan data sekunder melalui dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Humas Pemda DIY dalam mengelola informasi publik pasca pandemi Covid-19 yaitu dengan 1) pendefinisian masalah yaitu Humas Pemda DIY mengidentifikasi sebuah isu atau permasalahan melalui tim analis yang bertugas menganalisis isu atau permasalahan yang perlu ditindaklanjuti, 2) perencanaan program yaitu Humas Pemda DIY berkoordinasi dengan Subbag Protokol Setda DIY untuk melihat jadwal agenda terbaru pimpinan yang kemudian mempersiapkan tim peliputan yang terdiri dari reporter, videografer, dan fotografer, 3) aksi dan komunikasi (implementasi) yaitu Humas Pemda DIY melakukan peliputan secara langsung dan mengoptimalkan pemanfaatan media *online* dan media *mainstream* sebagai sarana penyebaran informasi, dan 4) evaluasi yaitu mekanisme evaluasi Humas Pemda DIY ini belum mempunyai standar evaluasi yang baik dalam mengelola aktivitas kehumasan khususnya dalam hal pengelolaan informasi publik. Kendala yang dihadapi oleh Humas Pemda DIY yaitu ada kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi sarana dan prasarana yang kurang serta minimnya tenaga kerja. Kendala eksternal yaitu adanya lima isu permasalahan yang terus berulang setiap tahun di DIY.

Kata kunci : Strategi, Humas Pemerintah, Informasi Publik

Abstract

This study aims to look at the DIY Regional Government Public Relations strategies and constraints in managing public information after the Covid-19 pandemic. This research uses descriptive qualitative method. Data collection methods include interviews and documentation. The validity of the data was checked using source triangulation techniques. Data analysis techniques use the Miles and Huberman models. The research data uses primary data sources, namely interviews and is strengthened by secondary data through documentation. The results of this study indicate that the DIY Regional Government Public Relations strategy in managing public information after pandemic Covid-19 is by 1) defining the problem, namely DIY Regional Government Public Relations identifying an issue or problem through a team of analysts tasked with analyzing issues or problems that need to be followed up, 2) program planning, namely DIY Regional Government Public Relations coordinating with the DIY Regional Secretariat Protocol Subdivision to see the latest leadership agenda schedule which then prepares a reporting team consisting of reporters, videographers, and photographers, 3) action and communication (implementation), namely the DIY Local Government Public Relations carries out live coverage and optimizes the use of online media and media mainstream as a means of dissemination of information, and 4) evaluation, namely the evaluation mechanism for Public Relations of the DIY Regional Government does not yet have good evaluation standards in managing public relations activities. The obstacles faced by the Public Relations of the DIY Regional Government are internal and external constraints. Internal constraints include inadequate facilities and infrastructure and a lack of manpower. External constraints is the existence of five issues that continue to recur every year in DIY.

Keywords : Strategy, Government Public Relations, Public Information

PENDAHULUAN

Tuntutan revitalisasi dan transformasi di bidang layanan informasi publik terkait dengan penerapan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap lembaga yang dibiayai oleh negara maupun masyarakat harus dapat menyediakan berbagai informasi dan data yang dibutuhkan oleh masyarakat mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program dan kebijakan yang dilakukan oleh suatu lembaga publik. Akan tetapi, faktanya lembaga humas pemerintahan masih jarang yang mempunyai standar evaluasi serta pelaksanaan fungsi yang tepat dalam mengelola aktivitas kehumasan. Tidak terkecuali *Government public relations (GPR)* Pemda DIY mulai dari sistem, proses serta mekanisme kerja yang dilakukan masih mengindikasikan pada aspek normatif kegiatan rutinitas pelayanan informasi dan komunikasi publik yang kurang. *Government public relations (GPR)* Pemda DIY dalam pelaksanaannya masih dengan pola pikir kinerja seputar pembuatan *press release*, pelaksanaan *kliping*, juru bicara pimpinan, pembuatan naskah pidato bagi pimpinan, dan konferensi pers. Kemudian juga masih kurang maksimal dalam hal penerapan strategi kehumasan dalam pengelolaan informasi publik. Akhirnya dalam proses pengelolaan informasi ini terkadang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dimana dalam realitanya, sekarang humas pemerintah mempunyai peran yang penting dalam membangun hubungan serta menciptakan citra positif lembaga.

Saat ini, bersamaan dengan tuntutan keterbukaan informasi publik, menjadi titik tolak humas pemerintah untuk dapat mengoptimalkan berbagai peran serta fungsinya menuju lembaga dan pranata humas yang baik. *Government public relations (GPR)* Pemerintah daerah DIY mempunyai tugas dalam menyaring pemberitaan negatif terhadap pemerintah serta memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan data dan fakta yang ada dalam pemerintahan. Informasi publik yang dimaksud meliputi pemberitaan terkait dengan kebijakan-kebijakan serta program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY. Salah satu fungsi Pemerintah Daerah DIY sebagai *Government Public Relations* adalah memberikan informasi dan penerangan terkait apa yang sudah diupayakan oleh suatu lembaga/instansi pemerintah. Pada dasarnya, *Government Public Relations* atau humas pemerintahan ini juga

bertugas untuk menyerap aspirasi publik, serta mempercepat penyampaian informasi terkait kebijakan serta program pemerintah yang sudah diatur dalam Inpres No. 09 Tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik. Dimana *Government Public Relations* Pemerintah Daerah DIY salah satunya berperan untuk menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, objektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti oleh masyarakat.

Sesuai dengan fungsi humas pada instansi pemerintah atau kedaerahan yaitu bertanggung jawab menjaga citra positif instansi dan mencitrakan daerah atau tempat dimana instansi tersebut berada, serta berperan menginformasikan semua tindakan dan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Humas pemerintah mempunyai peranan penting dalam membuka ruang bagi publik untuk mendapatkan akses informasi publik. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat serta media bila tidak akurat, cepat, dan mudah, dapat menyebabkan kebijakan pemerintah dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak informatif. Dalam proses penyampaian informasi kepada masyarakat, humas pemerintah biasanya menyampaikan informasi melalui media sosial, media massa, dan lainnya. Terutama pada media sosial sendiri, dimana saat ini media sosial menjadi *platform* yang kerap digunakan oleh humas pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Penelitian ini dilakukan dimana saat ini humas pemerintahan tengah menghadapi tantangan untuk dapat melaksanakan berbagai pengelolaan informasi serta komunikasi publik secara profesional dan proporsional. Sehingga diperlukannya suatu kajian mengenai strategi humas pada lembaga pemerintahan di era industri 4.0 ini. Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk mengetahui strategi *Government Public Relations (GPR)* Pemda DIY dalam mengelola informasi publik pasca pandemi Covid-19 secara mendalam serta kendala apa saja yang dihadapi oleh Humas Pemda DIY dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena adanya tujuan menghimpun data secara deskriptif dari

data yang didapat langsung dari subjek penelitian melalui sumber data primer wawancara, dengan pemilihan informan secara *purposive sampling* dan sumber data sekunder dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di era keterbukaan informasi publik saat ini, humas pemerintah sudah seyogyanya harus lebih proaktif serta kreatif dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Segala jenis informasi perlu disampaikan dengan cepat dan tepat kepada masyarakat. Hal ini dapat membangun dan meningkatkan kepercayaan serta kepuasan publik terkait dengan program dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan dengan hasil penelitian yang sudah dipaparkan di atas, Humas Pemda DIY terus meningkatkan terkait dengan kelancaran arus informasi serta meningkatkan mengenai penyebaran informasi terkait dengan kebijakan pemerintah pasca pandemi Covid-19 ini. Hal ini sesuai dengan salah satu tugas humas pemerintah berdasarkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan. Tidak hanya terkait dengan informasi program kebijakan pemerintah saja, tetapi Humas Pemda DIY juga memberikan informasi seputar isu atau permasalahan yang tengah berkembang di masyarakat.

1. Strategi Humas Pemda DIY dalam Mengelola Informasi Publik Pasca Pandemi Covid-19

Pada dasarnya humas pemerintah mempunyai tugas sebagai garda terdepan sumber informasi bagi masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, humas pemerintah harus memiliki strategi dalam mengelola informasi publik. Gagasan ini ditegaskan lagi oleh Suprawoto (2018:44), bahwa humas pemerintah diharapkan dapat menjalankan tugas dan kegiatan salah satunya menjadi lembaga yang berfungsi dalam jembatan komunikasi dan informasi bagi masyarakat. Humas Pemda DIY mempunyai beberapa strategi dalam mengelola informasi publik pasca pandemi Covid-19 yaitu pendefinisian masalah, perencanaan program, aksi komunikasi (implementasi), dan evaluasi.

a. Pendefinisian Masalah

Strategi awal yang dilakukan oleh Humas Pemda DIY yaitu mengidentifikasi suatu isu dan permasalahan yang ada. Humas Pemda DIY dalam mengidentifikasi suatu masalah mempunyai tim analisis yang bertugas menyeleksi isu atau permasalahan apa yang memang harus direspon oleh pemerintah Pemda DIY. Permasalahan isu yang difokuskan oleh Humas Pemda DIY pasca pandemi Covid-19 tidak terlalu spesifik. Fokus isu atau permasalahan yang dianalisis pasca pandemi Covid-19 secara umum lebih general, isu atau permasalahan sosial, ekonomi, budaya dan lainnya. Berbeda pada saat pandemi, dimana Humas Pemda DIY fokus utamanya lebih kepada permasalahan perkembangan Covid-19 di DIY. Sekarang isu permasalahan Covid-19 sudah tidak lagi menjadi fokus utama Humas Pemda DIY, mengingat bahwa sudah berakhirnya pandemi Covid-19 di Indonesia.

Kegiatan peliputan Humas Pemda DIY dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan rutin dan nonrutin. Kegiatan rutin ini kegiatan peliputan yang sifatnya wajib dilakukan yaitu agenda-agenda pimpinan daerah, dalam hal ini yaitu Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah. Adanya peliputan agenda pimpinan daerah ini diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui informasi-informasi baik terkait dengan kebijakan maupun program yang tengah dijalankan oleh pemerintah. Hal ini memperkuat gagasan bahwa, humas pemerintah sebagai corong informasi masyarakat atas pelaksanaan kebijakan pemerintah harus mengetahui informasi yang tepat dan terbuka sebagai wujud implementasi kausalitas adanya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) (Nugraha, A. R., Sjoraida, D. F., & Novianti, E. 2022:289).

Humas Pemda DIY juga mempunyai kegiatan peliputan non-rutin. Kegiatan peliputan non-rutin ini pembuatan berita, penyebaran informasi yang menyesuaikan dengan situasi yang ada di masyarakat. Misalnya, terdapat permintaan permohonan peliputan dari instansi-instansi yang ada maupun dari pihak swasta yang memiliki agenda

strategis di DIY. Disinilah tugas tim analis humas Pemda DIY untuk menyeleksi atau mengkurasi mana yang perlu dilakukan peliputan.

b. Perencanaan Program

Humas Pemda DIY dalam proses perencanaan, yang pertama yaitu selalu *update* agenda pimpinan terbaru di Subbag Protokol Pemda DIY. Jika sudah memperoleh informasi terkait agenda pimpinan apa saja, Humas Pemda DIY melakukan koordinasi dengan para staf yang ada untuk mempersiapkan tim peliputan, yang terdiri dari reporter, videographer, dan fotografer. Pada koordinasi tersebut juga sekaligus merencanakan terkait dengan bentuk konten seperti apa yang akan disebarluaskan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi humas secara khusus yaitu *information release*, dimana humas pemerintah harus selalu mengkomunikasikan setiap tindakan, langkah, kebijakan dan program kepada seluruh masyarakat agar dapat dipahami (Suprawoto, 2018:68).

Humas Pemda DIY memiliki tim analis yang bertugas untuk menganalisis isu atau permasalahan apa yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah. Tim analis ini sangat membantu kinerja Humas Pemda DIY dalam mengambil keputusan. Dengan analisis yang telah dilakukan, Humas Pemda DIY dapat mengetahui langkah apa yang perlu dipersiapkan untuk menindaklanjuti hal tersebut. Misalnya ketika terdapat isu-isu yang sifatnya strategis di DIY, Humas Pemda DIY perlu meminta tanggapan dan kebijakan langsung dari pimpinan.

c. Aksi Komunikasi (implementasi).

Pada tahapan pelaksanaan ini, tim Humas Pemda DIY yang telah dibentuk langsung ke lapangan. Penerapan strategi peliputan secara langsung ini yang menjadi perbedaan strategi Humas Pemda DIY pada saat pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19. Dimana pada saat pandemi Covid-19 terkadang teknis pelaksanaannya tidak bisa terjun langsung ke lapangan. Peliputan secara langsung ini dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang valid dan akurat. Informasi ini bukan hanya

sekedar data yang kemudian asal disampaikan apa adanya, tetapi juga harus sudah diolah, diproses, dan disaring mana yang baik dan benar dan yang perlu disampaikan (Devi A.Y. 2018:31).

Humas Pemda DIY mempunyai peranan secara umum dalam bentuk kegiatan *Public Relations*, dimana Humas Pemda DIY memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan program maupun kebijakan apa saja yang dijalankan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan tentu dengan tujuan agar masyarakat dapat mendukung program maupun kebijakan tersebut sehingga pemerintah mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Scott M. Cutlip (2013:389), tugas utama dari seorang praktisi humas pemerintah ini adalah memberi informasi kepada publik. Adanya tujuan dari hal tersebut tentu untuk menciptakan pemahaman antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan dari humas pemerintah yaitu menciptakan pemahaman (*mutual understanding*) antara pemerintah dengan publik. Tujuan yang utama dari humas itu sendiri adalah menciptakan untuk saling pengertian di antara organisasi dengan publiknya (Kriyantono, R. 2021:56). Dengan demikian, humas diharuskan untuk dapat menjamin kecukupan informasi. Keberadaan profesi humas pemerintah ini mengalami perkembangan akibat tuntutan serta ekspektasi publik terkait hak atas informasi. Humas pemerintah juga mempunyai tugas menjadi garda terdepan sebagai sumber informasi bagi publik serta kemampuan (*skill*) guna meningkatkan kinerjanya dalam membangun reputasi serta kepercayaan publik (Suprawoto, 2018:61).

Tahapan berikutnya, setelah melakukan peliputan secara langsung dilanjutkan dengan proses pengolahan bahan informasi. Hasil pengolahan bahan informasi tersebut nantinya ada yang dalam bentuk informasi *release*, video dokumentasi dan foto dokumentasi. Bentuk informasi yang dihasilkan oleh Humas Pemda DIY juga menyesuaikan dengan perkembangan saat ini. Ketika

bahan informasi sudah selesai diolah, kemudian informasi tersebut akan disebarluaskan di berbagai *platform* media. Namun, sebelum konten informasi tersebut disampaikan ke masyarakat, konten informasi tersebut masih perlu dicek terkait dengan kebenaran (*valid*) staff Humas Pemda DIY lainnya. Di era keterbukaan informasi publik sekarang ini setiap informasi yang diberikan kepada masyarakat harus transparan, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan (Manurung, D. R. B., 2022:23). Humas Pemda DIY sangat memperhatikan hal-hal tersebut, agar nantinya tidak ada kesalahpahaman dengan masyarakat.

Humas Pemda DIY dalam melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat juga mengoptimalkan pemanfaatan media *online* dan media *mainstream* sebagai sarana penyebaran informasi. Media *online* menjadi salah satu media sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Humas Pemda DIY menggunakan beberapa *platform* media *online* yaitu *website*, dan beberapa media sosial seperti Instagram, Youtube, Twitter, Facebook, dan Tiktok. Penggunaan media *online* ini dianggap sangat efektif dalam melakukan penyebaran informasi ke publik. Mengingat saat ini masyarakat lebih sering mengakses media sosial daripada media-media konvensional.

Hal ini juga diungkap oleh Nugraha, A. R., Sjoraida, D. F., & Novianti, E. (2022:294) dalam penelitiannya mengatakan GPR atau humas pemerintah saat ini banyak yang memanfaatkan media *online* sebagai sarana penyampaian informasi ke masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Trisani, F. F. (2019:119) menyebutkan Humas Diskominfo Kabupaten Boyolali menggunakan media sosial sebagai saluran penyebaran informasi ke publik. Pemanfaatan media *online* dan media sosial ini juga dapat dijadikan sebagai sarana berkomunikasi dua arah dengan masyarakat. Hal ini sebagai bentuk *responsiveness to the public* komunikasi timbal balik humas pemerintah (Mordecai Lee, 2008:8-10). Gagasan tersebut diperkuat dengan

Peraturan Menpan RB. No. 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan, salah satu tugas humas pemerintah yaitu melakukan komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat (Suprawoto, 2008:64). Masyarakat dapat merespon terkait dengan informasi yang diberikan oleh humas pemerintah, dan humas pemerintah dapat melihat respon dari masyarakat.

Media *mainstream* juga dimanfaatkan oleh Humas Pemda DIY sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Walaupun sudah menggunakan media *online*, tetapi Humas Pemda DIY ini juga masih menggunakan media cetak, tv, dan radio sebagai sarana penyampaian informasi ke publik. Tidak dapat dipungkiri bahwa media cetak koran masih kerap dijadikan sumber informasi berita bagi masyarakat. Penelitian Azis, A (2018:79) mengungkapkan bahwa, humas pemerintah Kabupaten Luwu Timur juga menggunakan media cetak sebagai sarana penyebaran informasi bagi masyarakat yang tidak terjangkau internet. Humas Pemda DIY bekerjasama dengan beberapa wartawan media cetak lokal seperti, Harian Jogja, Kedaulatan Rakyat, Merapi, Tribun Jogja dan lainnya. Humas Pemda DIY juga menjalin hubungan yang baik dengan para wartawan karena dianggap cukup berperan besar pada kinerja Humas Pemda DIY dalam penyebaran informasi ke masyarakat. Adanya kerjasama hubungan pihak Humas Pemda DIY dengan wartawan lokal, *media relations* ini menjadi salah satu tujuan humas pemerintah (Mordecai Lee. 2008:8-10). Dengan menjaga kualitas pelayanan informasi yang baik kepada masyarakat ini juga dapat membangun citra positif pemerintah terhadap persepsi masyarakat. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan humas pemerintah yaitu membangun citra positif bagi pemerintah (Kriyantono, R. (2021:56).

d. Evaluasi

Tahapan evaluasi ini dianggap sebagai proses penilaian terhadap persiapan, pelaksanaan serta dampak program yang telah dijalankan. Terkait

dengan mekanisme evaluasi Humas Pemda DIY ini belum mempunyai standar evaluasi yang baik dalam mengelola aktivitas kehumasan khususnya dalam hal pengelolaan informasi publik. Karena evaluasi di Humas Pemda DIY ini tidak dijalankan secara terjadwal maupun terstruktur. Sedangkan evaluasi ini nantinya dapat digunakan untuk mengembangkan program strategi kehumasan yang lebih baik lagi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Islami, A.A (2022:86) dalam penelitiannya mengenai strategi kehumasan Pemerintah Kabupaten Balangan, dimana tahapan evaluasi ini cukup penting yang melibatkan penilaian publik terhadap hasil dari suatu kegiatan yang telah dijalankan oleh bagian kehumasan dan hasil tersebut akan dipakai untuk mengembangkan suatu pelaksanaan program agar lebih baik lagi dari sebelumnya. Evaluasi tidak hanya sebuah penilaian dari publik saja terhadap hasil suatu program yang di jalankan tetapi juga dari evaluasi tersebut digunakan dalam mengembangkan suatu pelaksanaan kegiatan agar lebih baik lagi dari sebelumnya (Cutlip, S. M., Center, A. H., Broom, G. M. 2013:158).

Evaluasi ini sangat diperlukan pada saat melakukan perencanaan strategi kehumasan. Tidak terkecuali terkait dengan perencanaan pengelolaan informasi publik yang dilakukan oleh Humas Pemda DIY. Dalam strategi kehumasan evaluasi yang terstruktur ini sangat penting untuk diterapkan pada setiap program kehumasan, demi memaksimalkan setiap kinerja yang ada (Islami, A.A 2022:86). Akan tetapi, terkadang evaluasi ini dijalankan setiap sebulan sekali oleh Humas Pemda DIY. Dengan melihat *rating* berita yang diberikan kepada masyarakat di *website* dan respon dari komentar di sosial media, dari situlah akan dilihat dan dijadikan sebagai bahan evaluasi. Dengan demikian, Humas Pemda DIY perlu memperhatikan lagi terkait mekanisme evaluasi agar apa yang akan dijalankan nantinya dapat lebih baik lagi.

Dari pembahasan yang sudah dipaparkan tersebut, dapat dikatakan bahwa strategi Humas Pemda DIY dalam

mengelola informasi publik pasca pandemi Covid-19 sebenarnya tidak banyak mengalami perubahan yang terlalu signifikan dibandingkan pada saat pra-Covid-19 dan saat pandemi Covid-19. Hanya yang membedakan terkadang pelaksanaan teknis di lapangan yang berbeda. Dimana pada saat Covid-19 petugas peliputan tidak bisa langsung kelapangan. Akan tetapi, secara manajemen dan SOP dalam prosesnya itu masih sama.

2. Kendala Humas Pemda DIY dalam Mengelola Informasi Publik Pasca Pandemi Covid-19

Strategi pengelolaan informasi publik yang dijalankan Humas Pemda DIY ternyata tidak lepas dari adanya kendala atau hambatan. Terdapat kendala yang dihadapi oleh Humas Pemda DIY dalam proses pengelolaan informasi publik. Kendala yang dihadapi oleh Humas Pemda DIY dibagi menjadi dua, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yang dihadapi oleh Humas Pemda DIY yaitu terkait dengan kurangnya sarana prasarana yang ada. Hal ini karena melihat banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan, terkadang pada saat kegiatan peliputan masing kekurangan dalam hal sarana prasarana, seperti kamera dan handphone. Selain sarana prasarana yang kurang, Humas Pemda DIY juga masih terkadang masih kekurangan dalam hal sumber daya manusia (SDM) atau tenaga kerja yang ada.

Kemudian terkait dengan kendala eksternalnya yaitu adanya permasalahan isu-isu di Jogja yang berkembang dimasyarakat yang terus berulang-ulang. Hal itulah yang kemudian menjadi PR tersendiri bagi Humas Pemda DIY untuk dapat menyelesaikan isu permasalahan tersebut dengan baik. Walaupun pada kenyataannya tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Misalnya permasalahan kemiskinan, ketimpangan, sampah, klitih, dan UMR. Lima isu permasalahan tersebut yang terus berulang setiap tahun di DIY. Dimana masyarakat menjadikan permasalahan itu sebagai amunisi untuk kemudian melakukan repetisi untuk menyerang pemerintah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan:

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Humas Pemda DIY dalam mengelola informasi publik pasca pandemi Covid-19 yaitu, sebagai berikut:

1. Pendefinisian masalah yaitu Humas Pemda DIY mengidentifikasi sebuah isu atau permasalahan melalui tim analisis yang bertugas menganalisis isu atau permasalahan yang perlu ditindaklanjuti.
2. Perencanaan program yaitu Humas Pemda DIY berkoordinasi dengan Subbag Protokol Setda DIY untuk melihat jadwal agenda terbaru pimpinan yang kemudian mempersiapkan tim peliputan yang terdiri dari reporter, videografer, dan fotografer.
3. Aksi dan komunikasi (implementasi) yaitu Humas Pemda DIY melakukan peliputan secara langsung dan mengoptimalkan pemanfaatan media *online* dan media *mainstream* sebagai sarana penyebaran informasi.
4. Evaluasi yaitu mekanisme evaluasi Humas Pemda DIY ini belum mempunyai standar evaluasi yang baik dalam mengelola aktivitas kehumasan khususnya dalam hal pengelolaan informasi publik.

Kendala yang dihadapi oleh Humas Pemda DIY yaitu ada kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi sarana dan prasarana yang kurang serta minimnya tenaga kerja. Kendala eksternal yaitu adanya lima isu permasalahan yang terus berulang setiap tahun di DIY.

Saran:

Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya Humas Pemda DIY perlu adanya evaluasi yang terstruktur dan terjadwal guna mengoptimalkan kinerja dari Humas Pemda DIY. Selain itu lebih ditingkatkan lagi kualitas informasi publik dengan strategi yang sudah dijalankan guna menjaga citra positif dari masyarakat. Kemudian terkait dengan kendala maupun hambatan yang ada dapat diminimalisir guna meningkatkan pelayanan informasi ke masyarakat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penelitian yang memberikan manfaat bagi para praktisi humas khususnya dalam instansi pemerintah yang tengah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Tentu akan sangat besar nilai kebermanfaatannya yang diperoleh ketika penelitian ini digunakan untuk membantu

proses kinerja pelayanan informasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, A. (2018). Strategi Media Relation Hubungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagai Sarana Informasi Publik (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Cutlip, S. M., Center, A. H., Broom, G. M. (2013). *Effective Public Relations* (7th ed.). Pearson Education.
- Devi, A. Y. (2018). Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Indragiri Hulu (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Islami, A. A. (2022). Strategi Komunikasi Kehumasan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam Rangka Meningkatkan Citra Pemerintah.
- Kriyantono, R. (2021). *Best Practice Humas (Public Relations) Bisnis Dan Pemerintah: Manajemen Humas, Teknik Produksi Media Publisitas dan Public Relations Writing*. Prenada Media.
- Lee, M., Neeley, G., & Stewart, K. (Eds.). (2021). *The practice of government public relations*. Routledge.
- Manurung, D. R. B. (2022). Implementasi Peraturan Komisi Informan Nomor 1 Tahun 2010 Dalam Rangka Transparansi Informasi Publik di Pengadilan Negeri (Doctoral dissertation).
- Nugraha, A. R., Sjoraida, D. F., & Novianti, E. (2022). Analisis strategi humas pemerintahan era milenial dalam menghadapi tata kelola informasi publik. *PRofesi Humas*, 6(2), 286-310.
- Suprawoto, (2018). *Government Public Relations Perkembangan dan Praktik di Indonesia*.
- Trisani, F. F. (2019). Strategi Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali Dalam Pengelolaan Informasi Publik. *Lektur, Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.